

**MODEL KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA
KENDARI DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN WALIKOTA
LANGSUNG DAN SERENTAK TAHUN 2017**

Ober Yunus**Muh. Najib Husain Hasriani Amin**

**Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo,Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari.**

Obert_kom@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari dalam mensukseskan Pemilihan Walikota langsung dan serentak tahun 2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori komunikasi organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di kantor KPUD Kota Kendari jalan Chairil Anwar No. 10 Puuwatu. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (secara sengaja) yaitu informan dipilih berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti, dengan pertimbangan bahwa informan mampu memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses mensukseskan Pemilihan Walikota Langsung dan Serentak tahun 2017, model komunikasi kelompok atau organisasi digunakan oleh KPUD sehingga terjadi proses komunikasi kebawah, komunikasi keatas dan komunikasi kepada sesama jabatan dalam Sekretariat KPUD untuk melakukan setiap kegiatan organisasinya dalam rangka pelaksanaan Pilwali meliputi: mekanisme kerja KPUD Kota Kendari, proses koordinasi tahapan dan melakukan sosialisasi tentang pemilihan.

Kata Kunci: model komunikasi, Pemilihan, Walikota, organisasi

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bertujuan untuk memilih kepala daerah dengan cara demokrasi yaitu dipilih langsung oleh rakyat. Seperti halnya Pilkada serentak yang telah atau pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 yang lalu. Pilkada serentak merupakan Pemilihan Kepala Daerah baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak/ dalam waktu yang bersamaan.

Tujuh daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang ke-2 tahun 2017 mendatang. Tujuh daerah tersebut ialah Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna Barat, termasuk Kota Kendari sendiri. (www.mysultra.com)

Kota Kendari akan turut berpartisipasi dalam program Pilkada langsung dan serentak yang akan dilaksanakan 15 Februari 2017 mendatang. Kendari akan melakukan pememilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) untuk yang ketiga kalinya secara Demokrasi, yang akan melanjutkan kepemimpinan yang bakal di tinggalkan oleh Ir.Asrin selaku Walikota Kendari sekarang. Dengan harapan dapat terwujudnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari dengan lancar seperti slogan yang telah dikenal dimasyarakat yaitu “Wujudkan Pilwali Berintegritas, Pilwali Bermartabat”.

Untuk mewujudkan semua itu tentunya membutuhkan peranan dari lembaga yang mengatur dan mengawasi setiap proses dan tahapan menjelang Pilwali 2017, lembaga yang dimaksud disini adalah Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Independen yang dibentuk oleh Negara yang fungsinya untuk mengatur dan menjalankan proses-proses pemilihan di Indonesia, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tugasnya mengatur jalannya Pilkada/Pilwali di daerah. Serta mensukseskan Pemilihan yang akan dilaksanakan nantinya.

Untuk mewujudkan terciptanya Pilwali yang damai harus dimulai dari lingkungan birokrasi. Yaitu dalam ruang lingkup sekretariat KPUD Kota Kendari. Yang dimana memegang peranan penting sebagai lembaga yang mengatur dan menjalankan proses-proses Pilwali. Model komunikasi yang diterapkan didalam kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari menentukan akan keberhasilan sebuah tujuan bersama, Membangun hubungan komunikasi antar lini dalam kelembagaan KPUD sangatlah penting, karena semua orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut memegang peranan penting, baik dalam hal administrasi maupun pelaksanaan program. Tentunya semua ini kembali lagi kepada model komunikasi yang efektif yang mampu dibangun oleh pihak atasan kepada bawahan maupun dari bawahan kepada atasan dan mampu menciptakan komunikasi dua arah yang menandakan proses komunikasi yang terjadi didalam kelembagaan ini benar-benar berjalan dengan baik, serta kerja sama yang baik antara sesama pegawai yang memiliki kedudukan yang sama di

dalam. Sinegritas komunikasi diruang lingkup KPUD Kota Kendari harus dibangun demi terciptanya sebuah kesuksesan tujuan bersama mulai dari menjalankan proses Pilwali, mengkoordinasikan setiap tahapan Pilwali hingga proses sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPUD Kota Kendari agar tercapai tujuan bersama yaitu menyukseskan Pilwali 2017. Model Komunikasi yang dibangun KPUD dalam ruang Lingkup kelembagaan tentunya mempengaruhi proses dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan, mulai dari tahapan pencalonan, tahapan sosialisasi hingga pemungutan suara di setiap TPS.

Teori Komunikasi Organisasi

Pace dan Faules (2003 : 31) mengemukakan bahwa komunikasi organisasi merupakan petunjuk dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi menurut Pace dan Faules terdiri dari unit-unit dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya berfungsi dalam lingkungan.

Bila pesan mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau fungsi pekerjaan, maka pesan itu menurut jaringan komunikasi formal (Muhammad, 2008:107). Bentuk utama dari arus pesan dalam jaringan komunikasi formal terdiri atas tiga bagian yaitu :

1. *Downward Communication*/ komunikasi ke bawah

Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan kepada bawahan

2. *Upward Communication*/ komunikasi kepada atasan Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi

3. *Horizontal Communication*/ komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan antara orang yang sama otoritasnya didalam organisasi. pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik, saling menghormati dan saling memberikan informasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No 10, yang dianggap cukup representatif untuk mengetahui bagaimana Model Komunikasi yang digunakan atau dilakukan oleh KPU Daerah Kota Kendari dalam menyukseskan pelaksanaan Pilwali langsung yang tergolong dalam Pilkada serentak 2017. Lokasi dipilih dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dibentuk sebagai wadah operasional dalam rangka pelaksanaan Pilwali.

Subjek dan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dalam staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari yang berjumlah 30 orang. Sedangkan Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang yang ditetapkan secara *purposive sampling*, 1 orang Ketua KPUD, 1 orang sekretaris

KPUD, 4 orang kepala subbagian (Kasubag) KPUD, dan 2 orang staf pelaksana pada sekretariat KPUD.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu diperoleh serta dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka.

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Observasi ini dilakukan agar peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.
2. Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
3. Dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa foto, gambar atau

data-data lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila di dukung oleh foto-foto.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan gambaran atau data yang didapatkan ketika penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

model komunikasi yang dilakukan oleh komunikator adalah dengan membentuk kelompok kerja yang dimana tujuannya untuk berusaha mempengaruhi komunikan agar mereka dapat bekerjasama dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan tahapan-tahapan Pilwali, dan juga agar mereka dapat mengetahui tentang suatu objek dan jika perlu komunikan dapat berubah sikap dan perilakunya terhadap suatu objek tersebut. Seperti komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari dalam usaha mensukseskan Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari memiliki bentuk atau model komunikasi yang dibangun atau dilakukan dalam sekretariat KPUD.

Model komunikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari dalam secara teoritis dalam membangun komunikasi didalam sebuah lembaga atau organisasi sesuai dengan pandangan Marvin Shaw (Pace dan Faules 2006:46) menerangkan bahwa cara terbaik dalam membangun komunikasi dan membagi informasi dalam kelompok atau organisasi adalah

menggunakan tiga metode komunikasi organisasi seperti berikut: 1) *Downward Communication* (komunikasi kebawah) , terutama mengkomunikasikan pesan dari yang memiliki kekuasaan kepada yang lebih sedikit kekuasaannya; merupakan model umum komunikasi dalam sebuah organisasi. Komunikasi ini melibatkan instruksi, anggaran yang disetujui atau tidak, pernyataan kebijakan, variasi dalam standar prosedur operasi dan mencatat perubahan-perubahan lainnya, pengumuman umum, pertemuan, ekspresi tujuan, sasaran, dan pernyataan misi. 2) *Upward Communication* (komunikasi keatas) merupakan suatu kondisi yang mungkin lebih tak kalah pentingnya dari *downward communication*. Saluran *upward communication* membawa data dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan, dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk operasi organisasi dari hari ke hari. Keterangan ini dapat digunakan bila orang-orang yang berada di level atas di suatu organisasi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan mendengar, mengumpulkan feedback dan dapat dipercaya. 3) *horizontal communication* mengambil tempat satu level dalam organisasi. dalam tim, diantara kepala departemen dan diantara pengkoordinasi dan peranan penghubung. Terkadang, semakin cepat dan semakin efektif sebuah pesan terkirim secara horizontal daripada *upward* maupun *downward*. Komunikasi Horizontal yang bagus sering menghalangi persaingan, perilaku teritorial, dan spesialisasi fungsi pekerjaan yang berlebihan, yang dapat semakin mempertegas batas in group/out group, penggunaan jargon ataupun meniadakan kode-kode dan kesegaran untuk membagi informasi.

Dalam komunikasi kelompok atau organisasi memiliki saluran komunikasi yang merujuk pada kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Kerja KPUD Kota Kendari

Kegiatan kelembagaan yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara Pilwali yaitu dengan membentuk pola Kelompok Kerja (Pokja) dengan melibatkan seluruh anggota dan sekretariat KPUD, dan kemudian komunikasi terjadi lagi dalam kelompok atau divisi yang sesuai dengan tugas pokok dan kerjanya (Pokja), dengan tujuan informasi yang disalurkan dapat bersifat serentak atau kelompok. Komunikasi kelompok terjadi dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan pada fase- fase penyelenggaraan pemilu, karena pada fase tersebut kegiatan kelembagaan dilakukan dengan intensitas yang tinggi baik antara sesama jabatana (Komunikasi Horizontal) maupun Komunikasi antara atasan dan bawahan (Vertikal), sehingga komunikasi antara seluruh keanggotaan dalam ruang lingkup KPUD berlangsung dengan frekuensi yang tinggi pula. Aturan Tata Kerja kelembagaan yang menegaskan bahwa rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi, menjadikan komunikasi antarpribadi dan kelompok mutlak dilakukan untuk memudahkan kerja anggota dan koordinasi sehingga jalannya kegiatan organisasi dapat berlangsung dengan baik.

2. Proses Koordinasi Tahapan

Proses Koordinasi sendiri bertujuan untuk mengefektifkan proses kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari

dalam ruang lingkup sekretariat, dengan memberikan kebebasan kepada setiap divisi atau subbagian dalam mengkoordinasi setiap tugas-tugas dalam tahapan Pilwali misalkan dalam mempersiapkan setiap atribut tahapan, mulai dari atribut data pemilih hingga pada pemungutan suara di TPS, dengan cara setiap kegiatan tahapan selalu dikomunikasikan kepada bawahan ataupun atasan (*komunikasi Vertikal*) maupun kepada orang-orang yang memiliki jabatan yang setara (*komunikasi horizontal*), dengan tujuan setiap tugas yang diberikan dapat terkoordinasi dengan baik dan efektif agar dapat ditindak lanjuti dengan cepat melalui keputusan rapat pleno sebagai keputusan final. Selain didalam ruang lingkup sekretariat koordinasi juga dilakukan di luar lingkup KPUD yaitu dengan membentuk kelompok kerja Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana KPUD bertugas untuk mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilaksanakan panitia pelaksana di setiap wilayah kerjanya mulai dari pengumpulan data pemilih, pemuktahiran data pemilih, proses sosialisasi, pemungutan suara di TPS hingga proses perhitungan suara. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari bekerja sama dengan Bawaslu serta Polri dan TNI untuk menjaga setiap tahapan dapat berjalan dengan baik, agar tercipta Pilwali yang damai dan aman.

3. Sosialisasi Tentang Pemilihan

Selain secara teoretik pendidikan dan komunikasi sangat menentukan kesuksesan banyak hal, juga diakui oleh anggota KPUD Kota Kendari yang mana mereka melakukan langsung dilapangan sebagai bentuk pengalaman utamanya dalam memberikan sosialisasi Pilwali yang digencarkan oleh Komisi Pemilihan

Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari pada masyarakat. Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pilwali di antaranya yaitu: manfaat Pilwali, nama-nama peserta Pilwali, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, jadwal Pilwali, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi dilakukan secara menarik, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Kota Kendari memegang peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan Pilwali langsung dan serentak, karena berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh komunikasi yang baik didalam sebuah kelembagaan. Terlebih dahulu KPUD Kota Kendari membentuk Kelompok Kejra (Pokja) sesuai dengan peraturan KPU Pusat, setelah itu dikembalikan lagi kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. berkomunikasi serta membagi informasi kepada setiap anggota didalam sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari untuk menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Mekanisme Kerja KPUD Kota Kendari, Komunikasi yang terjadi dalam mekanisme kerja tersebut dapat mengalir dari atasan kepada bawahan maupun kepada atasan (*komunikasi vertical*) maupun komunikasi kepada yang memiliki jabatan yang sama (*Komunikasi horizontal*).
2. Proses Koordinasi Tahapan, dalam proses ini selalu dikomunikasikan kepada bawahan ataupun atasan (*komunikasi Vertikal*) maupun kepada orang-orang yang memiliki jabatan yang setara (*komunikasi horizontal*), dengan tujuan setiap tugas yang diberikan dapat terkoordinasi dengan baik dan efektif agar dapat ditindak lanjuti dengan cepat melalui keputusan rapat pleno sebagai keputusan final.
3. Proses Sosialisasi Tentang Pemilihan Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pilwali di antaranya yaitu: manfaat Pilwali, nama-nama peserta Pilwali, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, jadwal Pilwali, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara.

Keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari mulai dari mekanisme kerja KPUD, proses koordinasi tahapan, hingga melakukan sosialisasi tentang pemilihan, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih di Kota Kendari. Dimana Masyarakat Kota Kendari banyak menunjukkan partisipasinya dalam setiap tahapan Pilwali dimana dari pemilih yang terdaftar banyak yang menggunakan hak pilihnya dibanding anggota masyarakat yang tidak

menggunakan hak pilihnya (golput). Dimana dari 189.155 pengguna hak pilih di Kota Kendari tahun 2017 yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 153.412 atau (81,1%). Apabila dibandingkan dengan Pilwali tahun 2012 dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 214.665 jiwa di Kota Kendari, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 147.934 jiwa atau hanya (68.9%). hasil tersebut belum mampu mencapai target nasional tahun 2012 yaitu sebesar (75%).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri. 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Arifin, Anwar. 1984. *Ilmu Komunikasi*. PT. Grafindo, Jakarta.
- Asshidiqie Jimly. 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Konstitusi Pers. Jakarta
- 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan pertama. Konstitusi, press, Jakarta, 2006
- Cangara Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Devito A. Josep 1997. *Komunikasi AntarManusia*. PT. Karisma Publishing. Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Rosda Karya. Bandung
-2001. *Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Rosda Karya. Bandung
-1999. *Dinamika Komunikasi*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung .
- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepada daerah langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Arni. 2008. *Komunikasi Organisasi*. PT. Bumi Aksar. Bandung
- Mulyana Deddy, 2011. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya
- 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya
-2002. . *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya

- R.Wayne Pace & Don F. Faules.. 2003.*Komunikasi Organisasi. Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan.* Deddy Mulyana (editor), Cetakan ke empat. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- 2006. *Komunikasi Organisasi.* PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- S. Djuarsa Sendjaja dan T. Pradekso. 2006.*Teori Komunikasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.
-2004. *Teori Komunikasi.* Universitas Terbuka. Jakarta
- Suprpto Tommy. 2011. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi.* PT. Media Pressindo
- 2009 *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi.* PT. Media Pressindo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Penyelenggara Pemilu 2014.

Undang-Undang Pilkada Edisi Terbaru Uu No 8 Tahun 2015.

Undang-Undang No 1. Tahun 2014 *Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 *tentang wewenang KPUD dalam Pelaksanaan PILKADA*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Penyelenggaraan Pilkada, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Wakil dan Walikota dan Wakil Walikota*